

## Peran BUMDes dalam Pengembangan Pariwisata Berbasis Masyarakat di Desa Torongrejo Pasca Pandemi COVID-19

Altlya Elok Yearmil Shiona, Ahmad Arif Widiyanto

### Affiliation

Universitas Negeri Malang

### Correspondence

Altlya Elok Yearmil Shiona. Universitas Negeri Malang. Jl. Semarang No. 5 Malang, Jawa Timur, Indonesia. Email: [altlya.elok.1907516@students.um.ac.id](mailto:altlya.elok.1907516@students.um.ac.id)

### Abstract

Community based tourism is one of the tourism development models that makes the community the main actors in its development. As an institution formed to empower the community, BUMDes Bejo has a business unit focused on tourism development. This research aims to elaborate on the role of BUMDes Bejo in developing community-based tourism through the Banyu Rancang tourist attraction from its inception to the present. The research uses a qualitative descriptive research method with a case study approach. Data collection techniques in this research include observation, in-depth interviews, and documentation. The principles of Community Based Tourism (CBT) and Anthony Giddens' Structuration theory are used to analyze the results. The research results show that the role of BUMDes in developing community-based tourism in Torongrejo Village is not optimal, attributed to the unclear BUMDes structure since the pandemic and a lack of suitable human resources to manage it. Despite BUMDes having a limited role in its development, Banyu Rancang tourism is still being developed by the support of the Torongrejo Village Government and the Batu City Tourism Office. Based on the significance, domination, and legitimacy structure in the development of Banyu Rancang tourism, it is concluded that several stakeholders involved, including tourism managers, youth organizations, the Torongrejo Village Government, and the Batu City Department of Tourism have played their roles well through the support and motivation given to advance Banyu Rancang tourism.

**Keywords:** BUMDes, COVID-19 Pandemic, Community Based Tourism, Anthony Giddens Structuration Theory

**Submitted:** 12-12-2023 | **Revised:** 13-5-2024 | **Accepted:** 21-5-2024



## Pendahuluan

Dalam upaya mencapai tujuan pembangunan nasional, BUMDes dibentuk untuk memberdayakan masyarakat desa melalui potensi yang ada di desa. BUMDes merupakan lembaga usaha milik desa yang memiliki aspek sosial ekonomi di dalamnya. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa, BUM Desa adalah badan hukum yang didirikan oleh desa dan/atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Berdasarkan pemaparan definisi tersebut maka dapat diartikan BUMDes adalah lembaga yang didirikan oleh pemerintah untuk dikelola secara kolaboratif dengan masyarakat desa yang didalamnya terdapat beragam unit usaha yang bertujuan untuk membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Menurut BPS (2022) persentase desa yang memiliki BUMDes yaitu sebesar 74,09 persen, dan desa yang tidak memiliki BUMDes sebesar 25,91 persen. Desa Torongrejo merupakan salah satu desa yang memiliki BUMDes bernama BUMDes Berkah Torongrejo (BUMDes Bejo). Sebagai lembaga penggerak perekonomian desa, BUMDes Bejo memberikan wadah bagi masyarakat untuk mengembangkan segala potensi yang ada di desa guna mencapai kesejahteraan masyarakat. Sektor pariwisata memiliki peran penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Kegiatan pariwisata dinilai mampu mengurangi tingkat pengangguran dengan menciptakan peluang kerja sendiri bagi masyarakat di bidang kepariwisataan. Kegiatan pariwisata dapat dilakukan di berbagai daerah baik di kota maupun di desa. Pengelolaan pariwisata di daerah perdesaan penting dilakukan mengingat desa memiliki potensi alami yang melimpah, belum mengalami banyak perubahan, dan keasliannya masih terjaga sehingga dapat menarik minat wisatawan (Sumiasih, 2018).

Desa Torongrejo terletak di Kecamatan Junrejo yang merupakan wilayah bagian dari Kota Batu atau dikenal sebagai Kota Wisata Batu. Merujuk pada data BPS Kota Batu (2021) Kecamatan Junrejo memiliki objek daya tarik wisata yang banyak diminati wisatawan. Kecamatan Junrejo memiliki luas lahan pertanian 722,33 ha yang terdiri dari 636,24 ha sawah irigasi teknis, 86,06 ha sawah irigasi setengah teknis, dan sederhana. Dengan lahan pertanian yang luas daerah ini memiliki potensi untuk dikembangkannya wisata agro berbasis hortikultura. Tanaman hortikultura mendominasi hasil pertanian di Desa Torongrejo, antara lain yaitu bawang prei, seledri, bunga kol, dan tomat (Susenohaji dkk., 2019). Desa Torongrejo memiliki potensi sebagai desa wisata melihat dari adanya keunikan sejarah, keragaman budaya, lahan pertanian yang luas, dan kekayaan alam yang melimpah (Jadesta, 2022). Di Desa Torongrejo terdapat wisata budaya yang masih dilestarikan yakni situs peninggalan purbakala arca Ganesha, atraksi tari jaran kepong, dan bantengan (Reza, 2022). Selain wisata budaya, dan agro hortikultura desa ini memanfaatkan potensi sungai brantas untuk mengembangkan wisata arum jeram.

Selama masa pandemi COVID-19, tatanan kehidupan sosial telah mengalami perubahan besar. Banyak kegiatan masyarakat yang terhenti, sedangkan kehidupan harus tetap berjalan. Oleh karena itu masyarakat perlu banyak beradaptasi dengan keadaan di masa pandemi. Di awal masa pandemi pemerintah memutuskan kebijakan *social and physical distancing* yang kemudian beralih pada kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam rangka percepatan penanganan COVID-19 melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor

21 Tahun 2020, setelah itu disusul dengan kebijakan lainnya yaitu Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang ditetapkan dalam Inmendagri Nomor 39 Tahun 2021. Berdasarkan kebijakan-kebijakan tersebut masyarakat dihimbau untuk lebih waspada terhadap penyebaran virus COVID-19.

Transformasi baru dari adanya pandemi telah memunculkan era baru bagi masyarakat yang dikenal dengan istilah era *new normal*. *New normal* merupakan suatu perubahan perilaku dalam menjalankan aktivitas normal secara produktif, namun harus tetap menerapkan protokol kesehatan yang berlaku selama pandemi, diberlakukannya *new normal* bertujuan untuk mencegah terjadinya penularan virus corona jenis baru (Kominfo, 2020). Tidak dapat dipungkiri adanya pandemi telah melemahkan perekonomian dunia, termasuk Indonesia. Dampak yang ditimbulkan dari adanya pandemi tidak hanya terjadi pada sektor sosial, sektor ekonomi, dan sektor pendidikan saja, melainkan juga terjadi pada sektor pariwisata. Dampak pandemi terhadap kelangsungan sektor pariwisata di Indonesia yaitu terjadi karena adanya kebijakan-kebijakan baru yang mengharuskan semua tempat wisata ditutup sementara. Adapun dampak lainnya yang timbul yaitu menurunnya mobilitas masyarakat sehingga mengakibatkan terjadinya kemerosotan ekonomi yang cukup besar bagi sektor pariwisata (Utami & Kafabih, 2021).

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan beberapa penelitian terdahulu sebagai acuan untuk mengembangkan penelitian baru, diantaranya adalah penelitian oleh Herdiana (2019) membahas mengenai peran masyarakat dalam pengembangan desa wisata berbasis masyarakat. Temuannya menyatakan bahwa keterlibatan masyarakat sangat dibutuhkan pada setiap proses pengembangan wisata yang ada di desa, dimana masyarakat menempati dua peran sekaligus diantaranya sebagai subjek yang memiliki hak untuk menentukan arah pengembangan desa wisata, dan sebagai objek dalam tujuan desa wisata yang dimana kesejahteraan masyarakat diprioritaskan. Penelitian lain menyatakan bahwa keberadaan Pokdarwis memiliki peran penting dalam pengembangan, dan pengelolaan potensi wisata di Desa Pujon Kidul, hal itu dapat dilihat dari kontribusinya dalam memberikan pelatihan serta program pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk membantu meningkatkan perekonomian, dan kesejahteraan masyarakat (Umam dkk., 2022).

Penelitian lain oleh Wijaya & Sudarmawan (2019) ditemukan hasil bahwa penerapan konsep *Community Based Tourism* (CBT) dalam pengelolaan wisata alam Kampoeng Karts Rammang-Rammang telah sesuai dengan kriteria, yakni memperoleh dukungan masyarakat, bermanfaat ekonomis, tetap melindungi budaya dan lingkungan dalam kegiatan pariwisata. Penelitian oleh (Widiastuti, 2020) selama masa pandemi COVID-19 eksistensi BUMDes selaku pelaku usaha sangat dibutuhkan bagi ekonomi masyarakat desa, hal ini dikarenakan kesulitan yang dialami masyarakat desa untuk menjangkau ekonomi kota akibat adanya pembatasan sosial. Penelitian oleh Sumiasih (2018) penguatan kualitas sektor pada pariwisata dapat dilakukan BUMDes dengan cara meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) atau pengelolanya. Kemampuan serta pengetahuan SDM yang terbatas dapat diatasi melalui terjalannya kerja sama antara BUMDes dengan akademisi dalam rangka berkoordinasi untuk mengadakan sosialisasi atau pelatihan mengenai pengembangan sektor pariwisata.

Perbedaan penelitian ini dengan sebelumnya yaitu terletak pada metode, periode, dan lokasi penelitian. Beberapa penelitian terdahulu telah dilakukan pada masa sebelum hingga saat pandemi COVID-19 dengan metode yang berbeda antara lain metode penelitian hukum

empiris, metode campuran (*mixed methods*), metode *Focus Group Discussion* (FGD), dan metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan. Sementara itu penelitian ini dilakukan pada pasca pandemi COVID-19 dengan metode kualitatif deskriptif dan pendekatan studi kasus. Penelitian terdahulu memiliki kesamaan topik yaitu membahas mengenai *Community Based Tourism* (CBT), meskipun topik yang diangkat sama namun penelitian tersebut memiliki karakteristik tersendiri dari masing-masing daerah yang diteliti baik dalam segi geografis, masyarakat, dan kebudayaannya. Penelitian ini akan membahas topik yang serupa di lokasi yang berbeda dengan penelitian terdahulu. Penelitian ini dilakukan di Desa Torongrejo, Kecamatan Junrejo, Kota Batu.

BUMDes berperan penting dalam meningkatkan perekonomian desa, maka dari itu perlu adanya upaya sistematis untuk mendorong BUMDes agar mampu mengelola aset atau potensi yang ada di desa dengan sebaik-baiknya. Namun pada kenyataannya masih terdapat berbagai kendala, dan tantangan bagi BUMDes untuk menjalankan perannya tersebut, salah satunya adalah minimnya sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas. Kualitas sumber daya manusia (SDM) yang rendah dapat menghambat keberhasilan BUMDes, hal ini terjadi karena kurangnya pembinaan serta pelatihan bagi masyarakat itu sendiri. Penelitian ini akan berfokus pada peran BUMDes dalam pengembangan pariwisata berbasis masyarakat ditinjau dari aspek sosial, ekonomi, budaya, dan politik. Penelitian ini penting dilakukan untuk mengetahui bagaimana peran BUMDes Bejo dalam mengembangkan pariwisata berbasis masyarakat melalui unit wisata Banyu Rancang mulai dari awal terbentuknya hingga saat ini. Berkenaan dengan topik tersebut penelitian ini akan menggunakan prinsip *Community Based Tourism* (CBT), dan teori Strukturasi Anthony Giddens untuk menganalisis hasil.

## Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Penelitian kualitatif mempunyai sifat deskriptif, dan lebih menjurus pada analisis dengan menggunakan pendekatan induktif, sehingga makna berdasarkan sudut pandang subjek lebih difokuskan dalam penelitian. Pendekatan studi kasus merupakan pendekatan penelitian yang dilakukan secara intensif, terperinci, dan mendalam mengenai suatu peristiwa baik pada tingkat perorangan maupun kelompok dalam suatu lembaga atau organisasi dengan tujuan untuk memperoleh data secara detail tentang peristiwa yang sedang berlangsung (Rahardjo, 2017). Pendekatan studi kasus dilakukan untuk memperoleh pengetahuan deskriptif, eksplanatif, dan eksploratif. Menurut Creswell (2015) prosedur utama dalam pendekatan studi kasus yaitu melibatkan pemilihan kasus yang dianggap penting, yang setelah itu dilanjutkan dengan analisis holistik melalui deskripsi secara terperinci atas pola-pola, konteks, serta waktu dan tempat di mana kasus itu terjadi. Adapun pemilihan metode tersebut dalam penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh gambaran secara mendetail mengenai peran BUMDes dalam pengembangan pariwisata berbasis masyarakat di Desa Torongrejo pasca pandemi COVID-19.

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Observasi pada penelitian dilakukan melalui pengamatan secara langsung di lingkungan sekitar penelitian yaitu di Desa Torongrejo, Kecamatan Junrejo, Kota Batu. Tujuan dilakukannya observasi di daerah tersebut adalah untuk memperoleh data awal yang mendasari topik penelitian serta memperoleh informasi mengenai calon informan yang sesuai dengan kriteria penelitian. Adapun informan kunci dalam penelitian ini yaitu Ketua, dan Pengelola Unit Wisata Banyu Rancang. Sementara itu informan pendukung dalam

penelitian ini adalah Pengelola BUMDes Bejo, dan Staf Desa Torongrejo. Penelitian ini menggunakan metode wawancara semi terstruktur yaitu dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang telah disusun terlebih dahulu oleh peneliti, lalu mengembangkan pertanyaan tersebut berdasarkan jawaban yang diperoleh dari informan untuk memperoleh informasi lebih mendalam. Dokumentasi dalam penelitian ini berupa berupa gambar serta catatan dari hasil observasi, dan wawancara.

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data oleh Miles & Huberman yang mencakup tiga jenis tahapan yaitu dimulai dari reduksi data, kemudian penyajian data, dan tahapan yang terakhir adalah penarikan kesimpulan. Reduksi data merupakan proses klasifikasi data dengan memilih hal-hal pokok, berfokus pada hal yang penting, mencari pola, dan melepaskan yang dianggap tidak perlu. Display data merupakan proses penyajian data dengan menyusun data secara sistematis dalam bentuk uraian atau narasi, bagan, gabungan antar kategori dan sebagainya. Tujuan dari penyajian data tersebut adalah agar data lebih mudah dipahami. Penarikan kesimpulan/verifikasi data, merupakan proses terakhir dalam teknik analisis data. Pada penelitian kualitatif penarikan kesimpulan diharapkan dapat memuat suatu temuan baru (Creswell dalam Fadli, 2021).

## Hasil dan Pembahasan

Secara administrasi pemerintahan, Desa Torongrejo merupakan bagian dari Kecamatan Junrejo, Kota Batu dengan luas wilayah 4.106 Km. Daerah ini berada pada ketinggian 700 meter di atas permukaan laut. Desa Torongrejo terletak pada bagian selatan Kota Batu yang berbatasan langsung dengan Desa Mojorejo dan Desa Beji, di sebelah utara berbatasan dengan Desa Pandarejo dan Desa Giripurno, di sebelah timur berbatasan dengan Desa Pendem dan Desa Tawangargo, serta di sebelah barat berbatasan dengan Desa Temas (Sumanto dkk., 2019). Keberadaannya yang strategis disertai dengan potensi alam yang melimpah sangat mendukung desa ini untuk dijadikan sebagai desa wisata.



**Gambar 1. Peta Desa Torongrejo**  
(Sumber: Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) Lensa Torongrejo, 2023)



**Gambar 2. Lahan Pertanian Desa Torongrejo**  
(Sumber: Dokumen Pribadi Peneliti, 2023)

Sektor pariwisata memiliki potensi yang besar dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes). Pengembangan program desa wisata perlu dilakukan dengan tujuan membangun masyarakat di perdesaan untuk dapat mengelola kekayaan alam serta budaya yang dimiliki agar tetap terjaga kelestariannya (Padabain & Nugroho, 2018). Pembentukan program desa wisata oleh pemerintah secara langsung telah mampu memberdayakan masyarakat desa dalam kegiatan pariwisata. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata Pasal 4a sampai dengan Pasal 4e menyebutkan bahwa kegiatan pariwisata bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan

kesejahteraan rakyat, menghapus kemiskinan, mengatasi pengangguran, melestarikan alam, lingkungan, dan sumber daya.

Pengembangan desa wisata Torongrejo telah mulai direncanakan sejak tahun 2020 dengan mengangkat konsep wisata agro hortikultura, dan atraksi budaya. Perencanaan tersebut dilatarbelakangi dengan melimpahnya lahan pertanian, dan peninggalan budaya di Desa Torongrejo. Pemerintah Desa Torongrejo sempat melakukan sosialisasi terkait pengembangan desa wisata tersebut. Namun akibat pandemi pengembangan desa wisata mengalami berbagai kendala, dan tidak berjalan sesuai rencana. Adapun kendala utama yang dihadapi adalah kebijakan pandemi yang membatasi kelangsungan kegiatan pariwisata. Kendala lainnya yaitu terletak pada fasilitas wisata yang belum lengkap, dan masih minimnya minat masyarakat desa untuk turut serta berkontribusi dalam pengembangannya.

Sebagian besar pekerjaan masyarakat Desa Torongrejo adalah petani. Sungai Brantas merupakan sumber kehidupan bagi masyarakat setempat, dimana sungai ini dijadikan sebagai sumber irigasi pertanian yang ada di desa. Selain untuk irigasi, Sungai ini juga digunakan sebagai tempat latihan arum jeram oleh organisasi-organisasi pencinta alam (Fakhriyyah dkk., 2022). Kesadaran akan adanya potensi alam tersebut mendorong pemuda desa yakni karang taruna karsa bhirawa untuk menghidupkan kembali rencana pengembangan desa wisata Torongrejo, dimana karang taruna berinisiatif untuk mendirikan wisata arum jeram. Adapun upaya yang dilakukan oleh karang taruna untuk mendirikan wisata ini yaitu membuat konsep wisata dengan nama Banyu Rancang. Setelah itu karang taruna mengajukan proposal ke BUMDes Bejo untuk membentuk unit usaha baru. Pengajuan tersebut disetujui oleh BUMDes dan dibentuk unit usaha baru yang berfokus pada pengembangan wisata.

### **Keberadaan BUMDes Bejo**

Keberadaan BUMDes Bejo dari awal tidak terlepas dari dukungan Pemerintahan Desa Torongrejo yang meliputi Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD). Selain dukungan dari Pemerintahan Desa Torongrejo tersebut, pendirian BUMDes Bejo juga memperoleh dukungan dari Pemerintah Kota Batu, tokoh-tokoh masyarakat, dan dukungan khusus dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), serta Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (KDPDTT) melalui pendamping desa. Legalitas pendirian BUMDes Bejo tercantum dalam Peraturan Desa Torongrejo Nomor 5 Tahun 2018. Proses pendirian BUMDes Bejo sebenarnya sudah berjalan sejak tahun 2016, namun karena terdapat beberapa kendala BUMDes Bejo baru resmi terbentuk pada tanggal 11 April 2018.

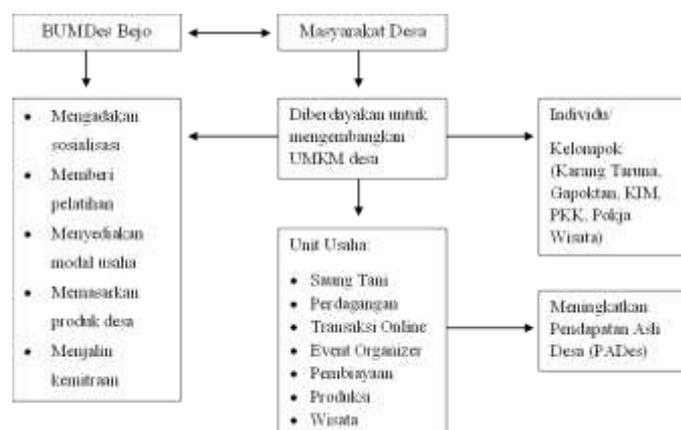
Tujuan utama BUMDes adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Hal-hal yang dilakukan BUMDes untuk mencapai tujuan tersebut antara lain memberdayakan masyarakat dengan memberi pelatihan berupa keterampilan pada suatu bidang tertentu yang dapat menghasilkan nilai ekonomi, mengoptimalkan aset desa, memperluas pasar, dan menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat desa. Adapun tujuan utama dari pembentukan BUMDes Bejo adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Torongrejo khususnya dalam bidang perekonomian. Untuk mencapai tujuan tersebut BUMDes Bejo berupaya menjalin kemitraan khususnya dengan masyarakat Torongrejo sendiri dalam proses pengembangannya, dan membuat usaha baru sesuai kebutuhan pasar dengan memanfaatkan potensi yang dimiliki tanpa mematikan usaha masyarakat yang telah ada.

Penjelasan lebih lanjut terkait dengan tujuan, dan upaya yang dilakukan BUMDes Bejo telah disampaikan oleh Roni dalam wawancara sebagai berikut:

*Tujuan yang utamanya ya untuk meningkatkan pendapatan asli desa (PADdes), dan tentunya untuk memberdayakan masyarakat desa. Intinya itu untuk meningkatkan ekonomi masyarakat. BUMDes Bejo ini melibatkan stakeholder yang ada. Kelompok-kelompok yang ada di desa seperti karang taruna, pokja wisata, gapoktan, ibu-ibu PKK, dan lain-lain itu kami libatkan semua, jadi masing-masing organisasi atau kelompok yang ada di desa kami berdayakan sesuai dengan perannya masing-masing. Salah satu contohnya gapoktan itu kan fokusnya ke bagian pertanian, jadi nanti mereka yang mengolah pertaniannya, setelah itu BUMDes yang berperan untuk membantu memasarkannya. (Wawancara 2023).*

BUMDes Bejo memiliki enam unit usaha di awal pembentukannya yakni unit saung tani, unit perdagangan, unit transaksi *online*, unit *event organizer*, unit pembiayaan, dan unit produksi. Di tahun 2020, BUMDes Bejo menambah unit usaha baru yaitu unit wisata. Unit saung tani merupakan unit usaha yang dikelola oleh Gapoktan Torong Makmur. Unit usaha saung tani adalah awal dari rencana pengembangan desa wisata di Torongrejo, namun unit usaha ini terhenti akibat pandemi. Unit perdagangan merupakan unit usaha yang berfokus pada kegiatan jual beli. Mitra dari unit perdagangan adalah toko-toko klontong milik masyarakat desa, adapun tujuan dibentuknya unit ini yaitu untuk membantu perekonomian masyarakat desa dengan memberi bantuan berupa penyediaan barang komoditas bagi masyarakat yang ingin menjalankan usaha toko. Unit transaksi *online* merupakan unit usaha yang memberikan pelayanan jasa berupa layanan transaksi pembayaran listrik, telepon, pajak bumi dan bangunan, dan lain-lain. Unit *event organizer* merupakan unit usaha yang menyediakan pelayanan jasa berupa perencanaan hingga pelaksanaan suatu acara tertentu. Unit pembiayaan merupakan unit usaha yang berfokus pada pemberian modal bagi masyarakat dalam mengembangkan usaha. Unit produksi merupakan unit usaha yang berfokus pada pembuatan produk oleh masyarakat desa. Unit wisata merupakan unit yang berfokus pada pengembangan wisata.

BUMDes Bejo berperan dalam memberdayakan masyarakat Torongrejo baik secara individu maupun kelompok untuk mengembangkan UMKM desa melalui unit-unit usaha yang dimiliki. Berikut adalah bagan terkait peran BUMDes Bejo bagi masyarakat:



**Gambar 3. Bagan Peran BUMDes Bejo bagi Masyarakat Torongrejo**  
(Sumber: diolah oleh peneliti, 2023)

Dalam pengembangannya setiap BUMDes memerlukan kerja sama dengan pihak-pihak eksternal yang antara lain yaitu pemerintah, lembaga keuangan, konsultan, lembaga riset, dan lain-lain. Adapun mitra eksternal BUMDes Bejo yaitu Pemerintah Desa Torongrejo, Pemerintah Kota Batu, Bank Nasional Indonesia 46 (BNI 46), Universitas Brawijaya (Program Doktor Mengabdi), Gapoktan Torongmakmur, penyedia event pariwisata, dan Tunas Tumbuh. Pembentukan agen BNI 46 telah membantu BUMDes Bejo dalam meningkatkan pelayanan kebutuhan transaksi masyarakat, selain itu BNI 46 juga membantu proses penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai untuk Peserta Keluarga Harapan (PKH) khususnya bagi masyarakat di Desa Torongrejo. Program Doktor Mengabdi oleh Universitas Brawijaya yakni melakukan pendampingan BUMDes Bejo, pendampingan ini dilakukan berdasarkan keahlian dari tim yang dikirimkan diantaranya yakni di bidang kepariwisataan, manajemen keuangan, dan administrasi perkantoran. Gapoktan Torongmakmur berperan sebagai penyedia produk serta SDM terlatih di bidang pertanian yang diharapkan dapat bersinergi dengan BUMDes Bejo dalam hal pemasaran, baik komoditas pertanian maupun produk paket wisata di Desa Torongrejo. BUMDes Bejo menjalin mitra dengan penyedia event pariwisata untuk memasarkan produknya baik berupa barang maupun jasa. Tunas Tumbuh merupakan sebuah lembaga swadaya masyarakat yang berorientasi pada bisnis dengan fokus ke komunitas anak muda. Tunas Tumbuh berperan dalam hal memfasilitasi pembentukan komunitas produktif kreatif bagi pemuda Desa Torongrejo untuk membranding berbagai potensi yang ada di desa.

Sejak pandemi BUMDes Bejo telah dinyatakan tidak aktif untuk sementara waktu, beberapa unit usaha terpaksa harus dihentikan karena dinilai sudah tidak berjalan dengan baik. Menurut (Pratiwi & Novianty, 2020) BUMDes yang terhenti ditengah pandemi disebabkan oleh beberapa faktor, penyebab utamanya adalah minimnya strategi yang digunakan, dan lemahnya pembinaan dari aparat desa. Keberhasilan BUMDes sangat bergantung pada strategi yang telah dibuat oleh pengelola BUMDes itu sendiri. Mayoritas BUMDes seringkali kurang memiliki persiapan yang matang dalam menentukan strategi untuk mengembangkan potensi desanya, hal ini mengakibatkan BUMDes tersebut sulit berkembang, dan pada akhirnya terpaksa harus berhenti.

Sebelum dinyatakan tidak aktif BUMDes Bejo sempat menjalankan fungsinya dengan dengan baik di bidang sosial maupun di bidang ekonomi. Berdasarkan fungsi sosialnya, BUMDes Bejo berupaya memberdayakan masyarakat desa melalui berbagai program unit didalamnya. Dalam pengembangannya BUMDes Bejo melibatkan masyarakat sesuai dengan perannya masing-masing di berbagai kelompok yang ada desa yakni karang taruna, gapoktan, pokja wisata, KIM, ibu-ibu PKK, dan lain-lain. Sementara itu berdasarkan fungsi ekonomi, BUMDes Bejo memiliki upaya untuk membantu perekonomian masyarakat desa melalui empat unit usaha yang berfokus pada bidang ekonomi diantaranya adalah unit perdagangan, unit transaksi *online*, unit pembiayaan, dan unit produksi.

BUMDes Bejo mengalami perombakan struktur pada tahun 2022, dari ketujuh unit usaha yang telah dibentuk oleh BUMDes Bejo hanya terdapat dua unit usaha yang masih dijalankan yaitu unit wisata dan unit perdagangan. Melihat kedua unit tersebut lebih berkembang dibandingkan dengan unit usaha lainnya Pemerintah Desa Torongrejo mengusulkan untuk memberhentikan sementara unit usaha lainnya yang dinilai tidak maju. Berikut adalah penjelasan dari Roni terkait hal tersebut:

*Saran dari Pemdes kemarin usaha yang kurang berjalan dengan baik harus divakumkan. Berarti kan ibaratnya usaha yang tetap dijalankan hanya*

*beberapa unit saja supaya lebih terfokus, diantaranya yaitu usaha yang masih memiliki potensi untuk berkembang. (Wawancara 2023).*

Setelah pergantian struktur BUMDes Bejo di tahun 2022 terdapat banyak perubahan pada program-program sebelumnya. Perubahan tersebut berada pada unit-unit usaha yang awalnya terdiri dari tujuh unit diubah menjadi tiga unit yaitu sebagai berikut:

- 1) Unit wisata, kuliner dan industri  
Pada struktur sebelumnya unit wisata hanya fokus mengembangkan wisata arum jeram, sementara itu dalam unit wisata pada struktur yang baru akan mengembangkan wisata dengan cakupan yang lebih luas. Unit ini berencana untuk menambah paket wisata desa antara lain yaitu jelajah desa, dan agrowisata. Selain itu saung tani akan dikembangkan kembali bersama dengan pendirian pujasera, dan pusat oleh-oleh. Hiburan seni budaya lokal, industri kerajinan, dan industri kreatif masyarakat rencananya juga dikembangkan dalam unit ini.
- 2) Unit pertanian dan peternakan  
Unit ini merupakan unit baru yang tidak terdapat pada struktur sebelumnya. Unit ini menjadikan potensi peternakan sebagai konsentrasi usaha baru BUMDes Bejo. Unit ini berencana mengembangkan peternakan kambing, kelinci, sapi, serta kolam ikan untuk pemancingan. Selain itu potensi pengelolaan pakan ternak, dan pengelolaan kotoran ternak juga akan dikembangkan dalam unit ini.
- 3) Unit perdagangan dan jasa  
Unit usaha ini adalah gabungan dari unit-unit usaha yang telah ada pada struktur sebelumnya yakni unit perdagangan, pembiayaan, dan *event organizer*. Unit ini berfokus pada pengembangan pelayanan penyediaan barang, dan jasa.

Saat ini BUMDes Bejo belum dapat dikelola secara optimal, hal ini dikarenakan masih adanya kendala terkait sistem manajemen yang kurang baik. Manajemen yang kurang baik berawal dari permasalahan internal yakni kurangnya komunikasi, dan adanya kesalahpahaman antar pengelola mengenai kinerja yang tidak sesuai sehingga perlu diadakan evaluasi mengenai hal tersebut. Selain itu perubahan struktur menjadi tantangan tersendiri bagi pengelola untuk merealisasikan program-program baru apabila manajemen strukturnya sendiri belum dibenahi. Masalah lainnya juga timbul akibat ketidaktahuan masyarakat tentang BUMDes Bejo. Beberapa masyarakat desa masih belum mengetahui bagaimana sistem pengelolaan BUMDes Bejo itu sendiri, sehingga masyarakat tersebut tidak menyadari akan pentingnya keberadaan BUMDes untuk meningkatkan perekonomian desa.

### **Prinsip Community Based Tourism pada Wisata Banyu Rancang**

*Community Based Tourism* (CBT) adalah prinsip pariwisata yang melibatkan masyarakat dalam proses pengembangannya. *Community Based Tourism* (CBT) adalah suatu pendekatan pengembangan pariwisata yang berfokus pada partisipasi aktif dari masyarakat lokal. *Community Based Tourism* (CBT) memberikan kebebasan bagi masyarakat dalam mengakses, mengelola, dan mengembangkan pariwisata yang dapat menciptakan pemberdayaan politik melalui kehidupan yang lebih demokratis, dengan demikian pembagian keuntungan dari kegiatan pariwisata lebih adil bagi masyarakat lokal (Hausler dalam Suganda, 2018). BUMDes Bejo menerapkan prinsip pariwisata berbasis masyarakat melalui unit wisata Banyu Rancang. Banyu Rancang resmi dibentuk sebagai unit wisata oleh BUMDes Bejo pada tanggal 12 September 2020. Struktur pengelola wisata Banyu Rancang terdiri dari ketua unit, penasehat, staf administrasi, staf marketing, dan staf teknis lapangan. Wisata yang baru dikembangkan

oleh Banyu Rancang adalah wisata rafting dengan fasilitas berupa peralatan *rafting, rafting trip, local transport, guide, rescue, dan snack*.

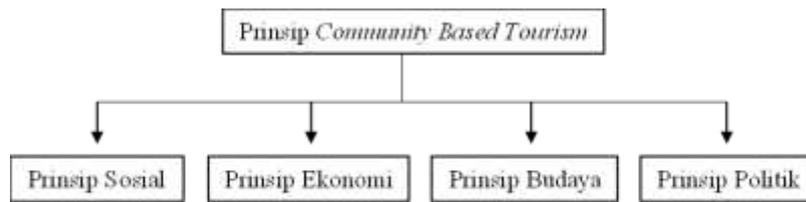
Unit wisata Banyu Rancang berencana untuk membuat sub-unit wisata baru, diantaranya yaitu wisata *outbound, tracking, camping ground, paintball* serta wisata agro hortikultura mengingat potensi alam Torongrejo yang asri dikelilingi oleh lahan pertanian. Selama masa pandemi COVID-19, wisata Banyu Rancang sempat terhenti karena adanya kebijakan PPKM yang mengharuskan berbagai tempat wisata ditutup sementara, dan segala kegiatan masyarakat di luar rumah dibatasi. Kebijakan ini diberlakukan untuk menekan lonjakan kasus COVID-19 dengan meminimalisir terjadinya kerumunan. Warsiadi selaku kepala unit wisata Banyu Rancang menjelaskan bahwa:

*Selama masa pandemi walaupun dari penerimaan wisatawan belum aktif, namun kami ada jasa rental peralatan rafting seperti perahu karet, helm, dayung, pelampung, dan lain-lain. (Wawancara 2023).*

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa selama masa pandemi wisata Banyu Rancang tidak dapat menerima wisatawan, namun tetap menyediakan jasa sewa peralatan *rafting*. Pemasukan wisata Banyu Rancang selama masa pandemi hanya berasal dari jasa sewa peralatan *rafting* sehingga hal itu berdampak pada penurunan pendapatan. Upaya yang dilakukan oleh pengelola wisata Banyu Rancang untuk bertahan ditengah pandemi yakni aktif melakukan promosi melalui berbagai platform media sosial. Solidaritas yang tinggi adalah kunci bagi para pengelola wisata untuk menghadapi krisis akibat pandemi. Pengelola wisata Banyu Rancang tetap mematuhi protokol kesehatan yang berlaku selama masa pandemi.

Konsep pariwisata berbasis komunitas tidak hanya berfokus pada keuntungan yang diperoleh. Pariwisata berbasis komunitas lebih memfokuskan dampak yang ditimbulkan dari pariwisata itu sendiri terhadap masyarakat, dan sumber daya lingkungan. Menurut UNEP dan WTO dalam Wijaya & Sudarmawan (2019) pariwisata berbasis masyarakat memiliki prinsip yang terbagi menjadi lima bagian diantaranya adalah prinsip sosial, prinsip ekonomi, prinsip budaya, prinsip lingkungan, dan prinsip politik. Prinsip sosial berkaitan dengan kualitas internal komunitas. Prinsip ekonomi berkaitan dengan pembagian profit kepada anggota komunitas. Prinsip budaya menitikberatkan pada toleransi, dan pelestarian kebudayaan lokal melalui kegiatan pariwisata. Prinsip lingkungan mencakup pemeliharaan kualitas lingkungan dalam kegiatan pariwisata. Sementara itu prinsip politik menyangkut tentang kekuasaan dalam menentukan kebijakan pada pengembangan pariwisata.

Menurut Hatton dalam Syarifuddin (2018) prinsip dasar pariwisata berbasis masyarakat dikategorikan menjadi empat prinsip yakni meliputi prinsip sosial, prinsip ekonomi, prinsip budaya, dan prinsip politik. Prinsip sosial menyangkut tentang otorisasi komunitas dalam memberikan izin, mendukung, membangun, dan mengelola kegiatan wisata yang terdapat di wilayahnya. Prinsip ekonomi menyangkut tentang sistem pembagian keuntungan yang diperoleh dari pengembangan industri pariwisata. Prinsip budaya mencakup tentang upaya menghargai, dan melestarikan budaya lokal dalam kegiatan pariwisata. Sementara itu prinsip politik mencakup tentang peran pemerintah setempat dalam memberi kebijakan agar prinsip sosial, ekonomi, dan budaya tersebut dapat terealisasi.



**Gambar 4. Bagan Prinsip Community Based Tourism (CBT)**

(Sumber: diolah oleh peneliti, 2023)

Prinsip sosial terlihat dari adanya motivasi masyarakat desa untuk turut terlibat dalam pengembangan wisata di Banyu Rancang. Adapun bentuk keterlibatan masyarakat desa yakni berupa ketersediaannya membuka jasa katering hingga homestay bagi wisatawan. Dengan adanya keterlibatan masyarakat wisata ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, dan mengurangi pengangguran di desa melalui terbukanya lapangan pekerjaan baru di bidang pariwisata. Sinergisitas, dan kolaborasi masyarakat dalam pengembangan desa wisata dapat menghasilkan suatu aturan atau norma tersendiri di kehidupan sosialnya, dimana terdapat sanksi sosial berupa teguran secara langsung bagi masyarakat yang melanggar aturan tersebut. Menurut Bapak Warsiadi keberadaan wisata Banyu Rancang sangat membantu masyarakat apabila telah dijalankan secara maksimal, namun akibat pandemi wisata ini belum dapat berjalan secara maksimal.

Wisata Banyu Rancang diakui sebagai usaha milik desa yang dikelola secara mandiri oleh masyarakat desa. Wisata Banyu Rancang menerapkan prinsip ekonomi dari *Community Based Tourism* (CBT berupa keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan terkait pembagian hasil keuntungan dari wisata Banyu Rancang. Keuntungan yang diperoleh dari wisata akan dibagikan secara adil, dan merata kepada anggota komunitas atau stakeholder yang terlibat dalam pengembangannya. Pengelola wisata Banyu Rancang terdiri dari sebelas anggota yang berasal dari tiga dusun yang ada di Desa Torongrejo, yaitu Dusun Ngukir, Dusun Tutup, dan Dusun Klerek. Berikut adalah penjelasan dari Warsiadi terkait dinamika pengelolaan wisata Banyu Rancang:

*Ada tiga dusun yang kita ambil masing-masing itu dari Dusun Ngukir tiga orang, Dusun tutup empat orang, terus Dusun Klerek empat orang, kita kelola, untuk hasilnya kita bagikan kepada BUMDes, Karang Taruna, Banyu Rancang, dan Kegiatan Sosial dengan jumlah presentase nya masing-masing antara lain yaitu sebesar 20% untuk BUMDes, 9,5% untuk Karang Taruna, 50% untuk pengelola Banyu Rancang sendiri, 20% untuk Operasional, dan selebihnya diberikan untuk kegiatan sosial sejumlah 0,5%. Berhubung karena BUMDes nya sendiri sedang vakum sekarang untuk pembagian hasilnya dialihkan ke Pemdes. (Wawancara 2023).*

Bulan	Pendapatan	BUMDes 20%	Karang Taruna 9,5%	Pengelola 50%	Operasional 20%	Sosial 0,5%
Januari	Rp 3,000,000	Rp 600,000	Rp 285,000	Rp 1,500,000	Rp 600,000	Rp 15,000
Februari	Rp 1,000,000	Rp 200,000	Rp 95,000	Rp 500,000	Rp 200,000	Rp 5,000
Maret	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
April	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
Mei	Rp 1,000,000	Rp 200,000	Rp 95,000	Rp 500,000	Rp 200,000	Rp 5,000
Juni	Rp 3,500,000	Rp 700,000	Rp 332,500	Rp 750,000	Rp 700,000	Rp 17,500
Juli	Rp 8,000,000	Rp 1,600,000	Rp 760,000	Rp 4,000,000	Rp 1,600,000	Rp 40,000
Agustus	Rp 6,250,000	Rp 1,250,000	Rp 593,750	Rp 3,125,000	Rp 1,250,000	Rp 31,250
September	Rp 7,450,000	Rp 1,490,000	Rp 707,750	Rp 3,725,000	Rp 1,490,000	Rp 37,250
Oktober	Rp 5,050,000	Rp 1,010,000	Rp 479,750	Rp 2,525,000	Rp 1,010,000	Rp 25,250
November	Rp 5,125,000	Rp 1,025,000	Rp 486,875	Rp 2,562,500	Rp 1,025,000	Rp 25,625
Desember	Rp 4,785,000	Rp 957,000	Rp 454,575	Rp 2,392,500	Rp 957,000	Rp 23,925
TOTAL	Rp 45,160,000	Rp 9,032,000	Rp 4,290,200	Rp 21,580,000	Rp 9,032,000	Rp 225,800

Gambar 5. Tabel Presentase Pendapatan Wisata Banyu Rancang Tahun 2022

(Sumber: diperoleh dari data primer, 2023)

Pengelola Wisata Banyu Rancang berupaya tetap menjaga lingkungan alam di desa dengan mengadakan kerja bakti, khususnya di Daerah Aliran Sungai Brantas. Pengelola menyediakan tempat sampah untuk dibagikan ke warga sekitar aliran sungai untuk menjaga kebersihan. Prinsip budaya juga diterapkan oleh masyarakat Desa Torongrejo. Masyarakat desa masih melestarikan budayanya melalui berbagai pertunjukkan kesenian lokal seperti ludruk, tayup, bentengan, dan lain-lain. Masyarakat desa juga kerap kali melakukan tradisi gotong-royong sebagai bentuk kerja sama untuk menjaga lingkungan. Selain tradisi gotong-royong masyarakat masih menghormati keberadaan leluhurnya melalui tradisi slametan dusun. Terkait hal tersebut Warsiadi menjelaskan bahwa:

*Ada tradisi yang namanya itu barian atau slametan dusun. Jadi itu hajatannya di tempat-tempat yang dianggap sakral seperti sungai, jembatan, sumber, sumber yang tiap hari untuk minum nah itu dikasih tumpeng, dan kami ramai-ramai hajatan disitu. Slametan dusun ini diadakan setiap setahun sekali di tiga dusun secara bergantian, dari Klerek, Tutup, Ngukir. Setelah itu menampilkan kesenian lokal seperti tarian-tarian tradisional dan lain-lain selama 4-5 hari. Dengan adanya kegiatan tersebut kami berharap lingkungan di desa ini selalu terlindungi. (Wawancara 2023).*

Prinsip politik dari *Community Based Tourism* (CBT) pada wisata Banyu Rancang terlihat dari adanya keterlibatan kelompok-kelompok masyarakat di desa. Sebagian besar masyarakat yang dilibatkan untuk mengelola wisata ini adalah karang taruna atau pemuda desa. Selain karang taruna, pokja wisata juga berpartisipasi dalam pengembangannya. Pemerintah Desa memberikan kepercayaan penuh terhadap masyarakat, khususnya bagi pemuda desa untuk mengembangkan wisata Banyu Rancang. Pemerintah Desa berupaya untuk meminimalisir adanya campur tangan pihak luar dalam proses pengembangan desa wisata Torongrejo, hal itu bertujuan agar masyarakat desa menjadi lebih mandiri dan dapat mencapai kesejahteraan dari hasil usahanya tersebut.



**Gambar 6. Kegiatan arum jeram Banyu Rancang**  
(Sumber: Dokumen Pengelola Wisata Banyu Rancang, 2023)

Pasca pandemi wisata Banyu Rancang mulai dioperasikan seperti semula, dan penerimaan wisatawan sudah kembali dibuka. Dinas Pariwisata Kota Batu memberdayakan pemuda Desa Torongrejo melalui kegiatan pelatihan pemandu wisata arum jeram. Kegiatan ini dilaksanakan selama 3 hari di Kaliwatu Rafting. Tujuan dari adanya kegiatan ini yaitu untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) sebagai pengelola wisata. Dinas Pariwisata juga memberikan dukungan terhadap Pengembangan wisata Banyu Rancang dengan memberikan empat unit perahu karet untuk wisata Banyu Rancang. Perahu karet tersebut diserahkan secara bersamaan dengan penyerahan fasilitas, dan perahu karet dari Pemerintah Desa Torongrejo.

Pada masa awal didirikannya Banyu Rancang sempat kurang memperoleh perhatian dari Pemerintah Desa. Tekad yang kuat dari pemuda desa untuk memajukan desa melalui pengembangan wisata ini telah membuahkan hasil, hal itu dapat dilihat dari adanya peningkatan minat wisatawan. Mengetahui perkembangan tersebut Pemerintah Desa memberikan dukungan penuh dengan membangunkan fasilitas serta memberikan tiga unit perahu karet untuk wisata Banyu Rancang. Saat ini jumlah total perahu karet yang dimiliki Banyu Rancang yaitu sebanyak dua belas unit.



**Gambar 7. Fasilitas Kantor**  
(Sumber: Dokumen Pribadi Peneliti, 2023)



**Gambar 8. Fasilitas Toilet**  
(Sumber: Dokumen Pribadi Peneliti, 2023)

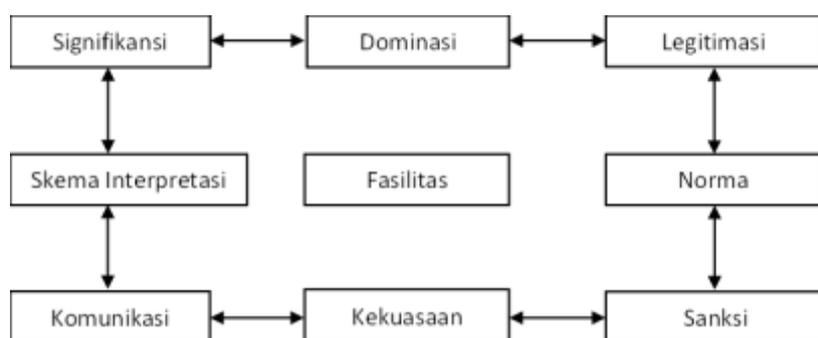


**Gambar 9. Acara Penyerahan Fasilitas**  
(Sumber: Dokumen Pribadi Peneliti, 2023)

### Pengembangan Wisata Banyu Rancang dalam Perspektif Teori Strukturasi Anthony Giddens

Agen, dan struktur tidak dapat dipahami secara terpisah. Agen, dan struktur bukanlah sekumpulan fenomena umum yang dapat berdiri sendiri (dualism), melainkan merepresentasikan dualitas. Agen tidak merujuk pada serangkaian tindakan-tindakan terpisah yang digabungkan bersama, tetapi pada suatu aliran perilaku yang berkelanjutan (Giddens, 1984). Hal utama yang dibutuhkan agen untuk melakukan praktik sosial yaitu rasionalisasi, dan motivasi. Agen dipandang sebagai individu atau suatu kelompok yang dapat memahami tindakannya sendiri, dimana agen sangat mengandalkan pengetahuannya dalam mengambil suatu tindakan. Adapun agen yang dimaksud dalam pengembangan wisata di Desa Torongrejo adalah karang taruna. Karang taruna termotivasi untuk membangun kembali program desa wisata dengan memanfaatkan potensi sungai sebagai tempat wisata. Agen lainnya yang turut membantu mengembangkannya antara lain yaitu pokja wisata. Bentuk rasionalisasi tindakan oleh agen tersebut terlihat dari kegigihannya untuk mendirikan wisata Banyu Rancang. Tindakannya diawali dengan cara meyakinkan BUMDes Bejo untuk merealisasikan pembentukan unit wisata, dan mengajak seluruh elemen masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengembangannya.

Dualitas struktur adalah landasan utama bagi pengulangan-pengulangan dalam reproduksi sosial yang melintasi ruang, dan waktu. Dalam dualitas struktur, struktur dilihat sebagai hasil dari tingkah laku (*conduct*) yang terorganisir secara berulang (Giddens, 1979). Terdapat tiga komponen struktur dalam dualitas struktur yakni signifikansi, dominasi, dan legitimasi. Signifikansi adalah fungsi struktur yang mengarah pada makna simbolik. Dominasi struktur terbagi menjadi dua yakni dominasi otoritatif, dan alokatif. Dominasi otoritatif mencakup penguasaan atas peran seseorang dalam bidang politik, sedangkan dominasi alokatif mencakup penguasaan dalam pengendalian sumber daya atau aset. Legitimasi adalah fungsi struktur yang meliputi tatanan moral berupa aturan, nilai, hingga standar sosial yang berlaku (Mahardika, 2015). Hubungan dualitas yang terorganisir antara agen dan struktur dalam pengembangan wisata Banyu Rancang yaitu terlihat dari adanya pergerakan agen mempengaruhi struktur untuk merasionalisasikan tindakannya. Struktur yang dimaksud dalam pengembangan wisata ini yakni BUMDes Bejo.



Gambar 10. Bagan Konsep Dualitas Struktur

(Sumber: diolah oleh peneliti, 2023)

Pada tahap signifikansi, agen dengan kesadaran diskursifnya mengomunikasikan pengetahuan yang dimilikinya kepada masyarakat. Signifikansi terwujud setelah agen berhasil menjalankan perannya dengan baik, dimana agen mampu menjangkau masyarakat untuk turut berpartisipasi dalam pengembangan wisata. Keberhasilan agen dimulai dari adanya komunikasi dengan struktur untuk bekerja sama membangun desa wisata, karang taruna selaku agen telah mampu menjalankan tugasnya tersebut melalui sosialisasi tentang

pentingnya partisipasi masyarakat desa dalam pengembangan desa wisata. Agen juga menyampaikan manfaat dari desa wisata bagi kesejahteraan masyarakat desa. Hal itu dilakukan oleh agen agar minat masyarakat untuk mengembangkan desa wisata meningkat.

Dominasi otoritatif dalam pengembangan wisata Banyu Rancang terlihat dari adanya dukungan dari Pemerintah Desa Torongrejo, dan Dinas Pariwisata Kota Batu. Dukungan yang diberikan yakni berupa pemberian modal usaha, penyediaan fasilitas wisata, dan melakukan pemberdayaan melalui kegiatan pelatihan pemandu wisata. Dominasi alokatif meliputi strategi pengelola wisata dalam mengembangkan sumber daya atau aset dengan sebaik-baiknya. Aset yang dominan dalam pengembangan wisata ini terletak pada sumber daya alam yang melimpah. Desa ini didominasi dengan lahan pertanian yang luas didampingi dengan keberadaan Gunung Wukir serta Sungai Brantas. Pengelola wisata memiliki kuasa untuk mengembangkan potensi tersebut, pengelola telah menyusun rencana untuk menambah atraksi wisata baru yang antara lain yaitu wisata *outbound*, *tracking*, *offroad*, *paintball*, dan mengembangkan kembali rencana wisata agro hortikultura.

Struktur legitimasi menyangkut tentang peraturan normatif. Program pengembangan desa wisata merupakan upaya yang dilakukan pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pemberdayaan Desa Wisata menyebutkan bahwa fasilitas pelaksanaan pemberdayaan desa wisata berupa pembinaan langsung, bantuan pembiayaan pemberdayaan, dan kerja sama daerah dengan pemangku kepentingan pariwisata. Dinas Pariwisata Kota Batu, dan Pemerintah Desa Torongrejo berperan penting dalam memberikan arahan serta memfasilitasi wisata Banyu Rancang agar dapat semakin berkembang khususnya setelah pandemi COVID-19.

## Kesimpulan

Peran BUMDes dalam pengembangan pariwisata berbasis masyarakat di Desa Torongrejo belum optimal, hal ini dikarenakan ketidakjelasan struktur BUMDes sejak pandemi, dan minimnya sumber daya manusia (SDM) yang tepat untuk mengelolanya. Meskipun BUMDes kurang berperan dalam pengembangannya, wisata Banyu Rancang tetap dikembangkan atas dukungan Pemerintah Desa Torongrejo, dan Dinas Pariwisata Kota Batu. Wisata Banyu Rancang menerapkan empat prinsip *Community Based Tourism (CBT)* dalam pengembangannya yakni prinsip sosial, prinsip ekonomi, prinsip budaya, dan prinsip politik. Di masa pandemi wisata Banyu Rancang mengalami penurunan pendapatan karena adanya kebijakan PPKM. Pendapatan wisata Banyu Rancang selama masa pandemi hanya berasal dari jasa sewa peralatan. Pasca pandemi wisata Banyu Rancang memperoleh pemberdayaan dari Dinas Pariwisata melalui kegiatan pelatihan pemandu wisata arum jeram di Kaliwatu Rafting. Berdasarkan struktur signifikansi, dominasi, dan legitimasi pada pengembangan wisata Banyu Rancang disimpulkan bahwa beberapa stakeholder lain yang terlibat yakni pengelola wisata, karang taruna, Pemerintah Desa Torongrejo, dan Dinas Pariwisata telah menjalankan perannya dengan baik melalui dukungan serta motivasi yang diberikan untuk memajukan wisata Banyu Rancang.

## Saran

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi peneliti selanjutnya untuk mengembangkan penelitian yang berkaitan dengan pariwisata berbasis masyarakat. Pengembangan desa wisata Torongrejo diharapkan dapat terealisasi sesuai rencana, dan

dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Pembenahan struktur, sosialisasi, dan pelatihan lebih lanjut mengenai manajemen pengelolaan BUMDes perlu dilakukan untuk menjalankan kembali BUMDes Bejo yang saat ini sedang terhenti. Selain itu juga perlu diadakannya sosialisasi, dan edukasi mengenai program pengembangan BUMDes Bejo.

## Referensi

- BPS. (2022). Statistik Potensi Desa Indonesia 2021. In Direktorat Statistik Ketahanan Sosial (Ed.), *Badan Pusat Statistik*.
- BPS Kota Batu. (2021). Kecamatan Junrejo Dalam Angka 2021. In *Badan Pusat Statistik Kota Batu*.
- Creswell, J. W. (2015). *Penelitian Kualitatif & Desain Riset Memilih di antara Lima Pendekatan (EDISI KE-3)*. Pustaka Pelajar.
- Fadli, M. R. (2021). Memahami desain metode penelitian kualitatif. *Humanika*, 21(1), 33–54. <https://doi.org/10.21831/hum.v21i1.38075>
- Fakhriyyah, D. D., Munawaroh, D., Utami, D., Putri, D., Nisa, K., Khaliza, F. N., Ahmad, F., Jaffan, J., Maimun, M., & Mudzakkir, M. (2022). Strategi Promosi Digital Marketing Wisata Rafting Guna. *Pena Dimas: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(1), 10–14.
- Giddens, A. (1979). Central Problems in Social Theory (Action, structure and contradiction in social analysis). In *MACMILLAN EDUCATION LTD*. <https://doi.org/10.1007/978-1-349-16161-4>
- Giddens, A. (1984). The Constitution of Society (Outline of the Theory of Structuration). In *University of California Press Berkeley and Los Angeles*. <https://doi.org/10.2307/2579442>
- Herdiana, D. (2019). Peran masyarakat dalam pengembangan desa wisata berbasis masyarakat. *Jurnal Master Pariwisata*. <https://doi.org/10.24843/JUMPA.2019.v06.i01.p04>
- Inmendagri Nomor 39 Tahun 2021. (2021). *Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat level 4, level 3, dan level 2 corona virus disease 2019 di wilayah jawa dan bali*. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia.
- Jadesta. (2022). *Desa Wisata Budaya Torongrejo*. Pesona Indonesia. [https://jadesta.kememparekraf.go.id/desa/budaya\\_torongrejo](https://jadesta.kememparekraf.go.id/desa/budaya_torongrejo)
- Kominfo. (2020). *Ketika Semua Harus Memulai Fase “New Normal.”* Kementerian Komunikasi Dan Informatika RI. <https://www.kominfo.go.id/content/detail/26442/ketika-semua-harus-memulai-fase-new-normal/0/artikel>
- Lensa Torongrejo. (2023). *Info Torongrejo*. <https://desatorongrejo.id/>
- Mahardika, M. A. (2015). Mahardika, M. A. (2015). Hubungan Agen dengan Struktur dalam Perubahan Sosial Kelurahan Gundih menjadi Kampung Gundih Berseri (Studi Kasus pada Kelurahan Gundih, Kecamatan Bubutan, Kota Surabaya). *Doctoral Dissertation, Brawijaya University*.
- Padabain, F. A., & Nugroho, S. (2018). Implementasi Program Desa Wisata Dalam Rangka Pemberdayaan Masyarakat di Desa Mas, Kecamatan Ubud Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali. *Jurnal Destinasi Pariwisata*, 5(2), 327. <https://doi.org/10.24843/jdepar.2017.v05.i02.p23>
- Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2022. (2022). *Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pemberdayaan Desa Wisata*.
- Peraturan Desa Torongrejo Nomor 5 Tahun 2018. (2018). *Peraturan Desa Torongrejo Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa Berkah Torongrejo*.

- Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa. (2021). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Tentang Badan Usaha Milik Desa*. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum. Sekretariat Kabinet Republik Indonesia.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020. (2020). *PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR DALAM RANGKA PERCEPATAN PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)*. Sekretariat Kabinet Republik Indonesia.
- Pratiwi, M. B., & Novianty, I. (2020). Strategi Bertahan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Pandemi COVID-19 pada Desa Cibodas Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat. *Prosiding The 11th Industrial Research Workshop and National Seminar*, 26–27.
- Rahardjo, M. (2017). *STUDI KASUS DALAM PENELITIAN KUALITATIF: KONSEP DAN PROSEDURNYA*.
- Reza, M. (2022). Penyusunan Masterplan Agrowisata Dan Atraksi Budaya. *Prosiding SEMSINA*, 3(2), 235–238. <https://doi.org/10.36040/semsina.v3i2.5125>
- Suganda, A. D. (2018). KONSEP WISATA BERBASIS MASYARAKAT. *I-Economic*, 4(1), 1–8.
- Sumanto, S., Hardiyanto, H., Widodo, B., & Sudiasa, N. (2019). Membatik Di Desa Torongrejo Kota Batu. *Industri Inovatif: Jurnal Teknik Industri*, 8(1), 50–51. <https://doi.org/10.36040/industri.v8i1.677>
- Sumiasih, K. (2018). Peran BUMDes Dalam Pengelolaan Sektor Pariwisata (Studi di Desa Pakse Bali, Kabupaten Klungkung). *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, 7(4), 565. <https://doi.org/10.24843/jmhu.2018.v07.i04.p10>
- Susenohaji, Kariyoto, & Ika Pratiwi, A. (2019). Pengembangan model kelembagaan desa wisata berkelanjutan di desa Torongrejo Kota Batu. *Seminar Nasional Hasil Penelitian Dan Pengabdian Pada Masyarakat IV*, 380–387.
- Syarifuddin. (2018). Penerapan Konsep Community Based Tourism (CBT) Dalam Pengelolaan Wisata Alam Kampoeng Karts Rammang-Rammang Kabupaten Maros. *Doctoral Dissertation, UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR*, 1–15.
- Umam, K., Kurniawati, E., & Widiyanto, A. A. (2022). the Dynamics of “Pokdarwis Capung Alas” in the Development of Community - Based Tourism in Pujon Kidul Village During the Covid-19 Pandemic. *Geojournal of Tourism and Geosites*, 43(3), 850–857. <https://doi.org/10.30892/gtg.43302-896>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009. (2009). *UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 2009 TENTANG KEPARIWISATAAN*. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum. Sekretariat Kabinet Republik Indonesia.
- Utami, B. A., & Kafabih, A. (2021). Sektor Pariwisata Indonesia Di Tengah Pandemi Covid 19. *Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan*, 4(1), 383–389. <https://doi.org/10.33005/jdep.v4i1.198>
- Widiastuti, Y. A. (2020). PERAN BUMDES DALAM MENJAGA KEBERLANJUTAN EKONOMI MASYARAKAT DESA PADA MASA PANDEMI. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(2), 125–130. <https://doi.org/10.33061>
- Wijaya, N. S., & Sudarmawan, I. W. E. (2019). Community Based Tourism (CBT) Sebagai Strategi Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan Di DTW Ceking Desa Pekraman Tegallalang. *Jurnal Ilmiah Hospitality Management*, 10(1), 77–98. <https://doi.org/10.22334/jihm.v10i1.162>